

PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: SEBUAH UPAYA KONTRA NARASI RADIKALISME

Mulawarman Hannase

*Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan
Global, Universitas Indonesia*

Email: mulawarmanhannase@ui.ac.id

Fatwa Arifah

*Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta*

Email: fatwa.arifah@unj.ac.id

Abstract:

This article examines how to implement the values of multiculturalism in the Islamic education curriculum as an attempt to counter narrative of radicalism in various educational institutions. This study is regardedly important due to currently in the development of educational curriculum, the issue of intolerance and split religious understanding has come to the attention of the government as well as society of Indonesia. This study is a qualitative by using multicuralism theory of James A. Bank's. The study confirm that multiculturalism-based learning which contains of values of togetherness, humanity, tolerance, culture and local wisdom should be adopted as an alternative to counter radical narrative in the different educational institutions.

Tulisan ini mengkaji bagaimana implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai upaya untuk melakukan kontra narasi radikalisme di lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini penting karena dalam perkembangan dunia

pendidikan akhir-akhir, isu intoleransi dan pemahaman keagamaan yang keras menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori multikulturalisme James A. Bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis multikulturalisme yang muat nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, toleransi, budaya dan kearifan lokal dapat dijadikan alternatif untuk melakukan upaya kontra narasi radikalisme.

Kata Kunci: Kurikulum, Multikulturalisme, Pendidikan Islam, Radikalisme

PENDAHULUAN

Musa Asy'arie menyatakan bahwa Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.¹ Pendidikan yang menggunakan kurikulum berbasis multikultural juga sangat efektif diimplementasikan sebagai upaya melakukan kontra narasi radikalisme di berbagai institusi pendidikan di Indonesia.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum sejatinya memiliki fungsi sebagai acuan dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran di sekolah bagi semua unsur, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat dan lainnya. Namun demikian untuk merealisasikan

¹ Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546.htm>, diakses tgl 20 Juni 2009, 10:15 WIB.

kurikulum pendidikan, dalam hal kurikulum 2013, memerlukan upaya dan usaha menerapkannya dalam langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk mewujudkan tujuan yang termuat dalam kurikulum pendidikan.

Berkaitan dengan kurikulum berbasis multikultural dalam konteks Indonesia, dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan. Dalam hal ini, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan, khususnya di era merebaknya berbagai pemahaman termasuk isu radikalisme agama.

Untuk meminimalisir hal di atas, di sekolah harus ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleran, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai perbedaan. Proses pendidikan ke arah ini dapat ditempuh dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengahnya masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial.

Fungsi Pendidikan multikultural adalah untuk dapat saling menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Melalui, misalnya, peribahasa yang memiliki kearifan lokal di dalamnya akan membantu menemukan titik persamaan dari kebudayaan yang berbeda. Hal tersebut yang akan dibahas dalam makalah ini. Penulis berusaha menawarkan penanaman nilai-nilai kebersamaan dan toleransi sebagai salah satu cara untuk menerapkan pendidikan multikultural.

LANDASAN TEORITIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Belakangan ini ramai dibicarakan mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural muncul sebagai bentuk protes atas diskriminasi yang ada dalam pendidikan. Sebelum membahas mengenai pendidikan multikultural, penulis akan membahas mengenai multikultural.

Multikultural menurut studi sosiologi dan antropologi tentang masyarakat majemuk (*plural society*) merupakan “ideologi” dari sebuah masyarakat multikultur, masyarakat multikultur itu sendiri adalah masyarakat yang tersusun oleh keberagaman etnik karena dukungan keberagaman etnik atau kebudayaan dalam arti luas.

Maka ideologi multikultural diartikan sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik kepada etnik lain, misalnya memberikan keleluasaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya, dan ekspresi tersebut merupakan salah satu kontribusi penting bagi pengembangan budaya suatu bangsa.

Sleeter membagi pengertian multikulturalisme menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua perbedaan dengan makna yang saling berkaitan. Yaitu:

- (1) Multikulturalisme sebagai kondisi kemajemukan kebudayaan atau pluralism budaya dari suatu masyarakat. Kondisi ini diprediksikan dapat menumbuhkan sikap toleransi.
- (2) Multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat yang dirancang agar seluruh masyarakat dapat memperhatikan kebudayaan dari semua etnik dan suku bangsa. Hal ini karena, seluruh etnik atau suku dan bangsa telah member kontribusi bagi pembentukan dan pembangunan suatu bangsa.

Kedua, sebagian Negara menganggap bahwa multikulturalisme merupakan konsep sosial yang diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah diharapkan mampu mendorong lahirnya sikap apresiatif, toleransi, prinsip kesetaraan antar berbagai kelompok etnik, termasuk kesetaraan bahasa, agama, maupun praktik budaya lainnya.

Ted Gordon dan Wahneema Lubiano menyatakan bahwa multikulturalisme sebenarnya adalah pemahaman yang sangat sederhana tentang bagaimana kebudayaan yang berbeda-beda itu menerpa kehidupan kita semua. Dan terpaan tersebut harus kita terima tanpa pertimbangan dan pilih kasih, demi mendukung kesetaraan dan keseimbangan dalam kekuasaan.

Ketiga, jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural (multikultural education), multikultural merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keragaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural, strategi ini sangat bermanfaat; seperti dari sekolah sebagai lembaga pendidikan, dapat terbentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan dan demokrasi dalam artian luas.

Keempat, multikulturalisme sebagai sebuah ideology dapat dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. Melalui ideology multikultural tersebut, semua pihak diajak untuk menerima standar umum kebudayaan yang dapat membimbing kehidupan kita dalam sebuah masyarakat yang majemuk.²

²Alo Liliweri, *Prasangka & konflik: komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur*, (Yogyakarta: PublisherPT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 68-69.

Pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Adapapun tujuan awal gerakan tersebut adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

James A. Bank menyatakan bahwa gerakan hak-hak sipil tersebut berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi³. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), *gender*, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.⁴

Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (lingua

³ James A. Bank, *Multikultural Education: Issues and Perspectives*, (London: Allyn and Bacon Press. 1989), 4-5.

⁴ James A. Bank, *Multikultural Education*, 14.

francka), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi.⁵ Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Ricardo L. Garcia menyebutkan bahwa hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya tiga teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya. ketiga teori sosial tersebut adalah:

1. Melting Pot I: Anglo Conformity,⁶
2. Melting Pot II: Ethnic Synthesis⁷, dan
3. Cultural Pluralism: Mosaic Analogy⁸.

⁵Leo Suryadinata, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 30, 71, 104 dan 109.

⁶Berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang—seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya—harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya. Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak sangat tidak demokratis.

⁷Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.

⁸Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun.

Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (*communal theory*).⁹ Dari ketiga teori tersebut, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Untuk konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Jose A. Cardinas menyatakan bahwa pentingnya pendidikan multikultural ini didasarkan pada lima pertimbangan:

1. *incompatibility* (ketidakmampuan hidup secara harmoni),
2. *other languages acquisition* (tuntutan bahasa lain),
3. *cultural pluralism* (keragaman kebudayaan),
4. *development of positive self-image* (pengembangan citra diri yang positif), dan
5. *equility of educational opportunity* (kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan).¹⁰

Donna M. Gollnick menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi:

1. bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi;
2. keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini;
3. keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara;

⁹Ricardo L. Garcia, *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. (New York: Harper & Row Publisher, 1982), 37-42.

¹⁰Jose A. Cardinas, *Multikultural Education: A Generation of Advocacy*, (America: Simon & Schuster Custom Publishing, 1975), 131.

4. distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik;
5. sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis; serta
6. para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.¹¹

Hernandez, seperti dikutip Liliweri, mengemukakan sisi lain dari pendidikan multikultural yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman tentang betapa pentingnya perbaikan sistem pendidikan agar dapat menyadarkan dan meyakinkan warga masyarakat tentang keragaman budaya, dan keragaman itu berpengaruh pada kepentingan sosial politik suatu bangsa.
2. Pendidikan multikultur berlaku untuk semua siswa. Karena itu, perlu pendidikan para guru yang berwawasan multibudaya agar dapat mengajar secara efektif.
3. Mengajarkan kepada anak-anak pengetahuan, sikap dan perilaku lintas budaya.
4. Mengubah sistem pendidikan agar tak boleh melayani sebagian murid dari etnik nasional tertentu, tetapi mengajarkan pelajaran kepada semua etnik secara seimbang.
5. Pendidikan multikultur hendaklah dijadikan inovasi pendidikan atau reformasi pendidikan.
6. Mendidik para orang tua sebagai lingkungan pertama yang memberikan pengetahuan multikultur kepada anak-anaknya. Jadi, orangtua adalah guru multi-etnik dan guru multikultur.

¹¹ Donna M. Gollnick, *Multikultural Education in a Pluralistik Society*, (London: The CV Mosby Company, 1983), 29.

7. Meningkatkan interaksi kelas antara guru dengan murid. Interaksi harus didukung oleh mayoritas kelas dan bukan sekadar oleh sekelompok orang.¹²

Mengenai fokus pendidikan multikultural, H.A.R. Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap *indeference* dan *non-recognition* tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural seyogyanya berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.¹³

Adapun pelaksanaan pendidikan multikultural tidaklah harus mengubah kurikulum. Pelajaran pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Hanya saja diperlukan pedoman bagi guru untuk menerapkannya. Yang utama kepada para siswa perlu diajari mengenai toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai. Hal tersebut sangat berharga

¹² Alo Liliweri, *Prasangka & konflik*: 96.

¹³H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002), 1.

bagi bekal hidup mereka di kemudian hari dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.

Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku mereka sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi akan relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud.

Dalam konteks deskriptif dan normative, kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya dikriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari warga yang berasal dari suku, ras, budaya dan agama yang berbeda, memerlukan pendidikan multikultural, yang membuat dan menciptakan situasi sekolah dan kegiatannya sehingga semua siswa dari berbagai suku, ras, budaya dan keadaan mendapat kesempatan belajar dengan baik.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Membentuk manusia yang berakhlak mulia adalah salah satu dari tujuan pendidikan nasional¹⁴. Kondisi moral generasi muda saat ini

¹⁴Yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab II, Pasal 3 yang menegaskan bahwa: "*pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman*

yang sangat memprihatinkan, mendorong banyak kalangan untuk menemukan solusi dari masalah penurunan moral tersebut. Pemerintah menjadikan agama sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.¹⁵ Selanjutnya sebagai usaha pencegahan dampak negatif globalisasi yang berupa penurunan moral bangsa tersebut, maka diberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Pendidikan tersebut selama ini diberikan dalam pendidikan agama. Dan khusus dalam Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah telah diberikan dalam beberapa aspek, yaitu: keimanan, ibadah, syariah, akhlak, al-Qur'an, muamalah dan tarikh.¹⁶

Namun, pendidikan agama di sekolah-sekolah umum sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Pendidikan agama di nilai tidak berhasil dalam membentuk perilaku dan sikap keagamaan, yang mencerminkan iman dan takwa, serta dipandang kurang berhasil dalam menumbuhkan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan di antara umat beragama yang ada di luar bahkan di dalam agama.

Azumardi azra mengatakan bahwa pendidikan agama tetap dibutuhkan dengan orientasi baru, yaitu:

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

¹⁵Menjawab permasalahan tersebut, MPR mengeluarkan TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Pada bab II huruf D butir 1 tentang agama berbunyi: *“Menetapkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan Negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama”.*

¹⁶Hal ini sesuai dengan keputusan MPR dalam TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai Haluan Negara, khususnya dalam Bab 11/ huruf D mengenai agama dan sosial budaya, butir 2.h disebutkan bahwa *meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur masyarakat melalui pendidikan agama bagi masyarakat dan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah dan menangkal setiap usaha dan kegiatan yang dapat mendorong dan menumbuhkan akhlak yang tidak terpuji di kalangan masyarakat maupun yang dipublikasikan melalui media massa.*

1. Dengan menekankan perspektif multikulturalisme yang pada dasarnya menekankan adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat dielakkan umat beragama manapun;
2. Memperbaiki metode pembelajaran yang berorientasi multikultural tersebut, dari penekanan yang terlalu kuat pada aspek kognitif kepada afektif dan psiko-motorik;
3. Peningkatan kualitas guru, baik dari sudut pemahamannya atas agamanya sendiri maupun agama lain, sehingga mereka sendiri dapat memiliki perspektif multikulturalisme yang tepat.¹⁷

Selanjutnya kontroversi muncul dari UU No. 20 tentang Sisdiknas 2003. Kontroversi tersebut menyangkut penyelenggaraan pendidikan agama seperti terdapat pada pasal 12 ayat 1 butir a yang berbunyi: “Setiap peserta satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.

Jason Lase mengemukakan bahwa dari segi konstelasi peraturan perundangan-undangan, UU tersebut telah mencerminkan dan mengandung prinsip dan perspektif pendidikan multikultural. Karena ketentuan tersebut memiliki tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk menjaga penyimpangan atau kesalahan penafsiran norma agama yang bisa terjadi jika diajarkan pendidik yang tidak seagama;
2. Dengan adanya guru yang seagama dengan peserta didik, maka dapat lebih terjaga kerukunan hidup beragama di antara peserta didik berbeda agama yang belajar pada satuan pendidikan yang sama;

¹⁷Azyumardi Azra, Idris Thaha, *Dari Harvard hingga Makkah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), 149-150

3. Agar terjadi profesionalisme dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan agama.¹⁸

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan peserta didik dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sadar dengan nilai etis Islam.¹⁹

Pendidikan Islam bukan hanya sekadar *transfer of knowledge*, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan, suatu sistem yang terkait langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah.²⁰

Konsepsi pendidikan model Islam tidak hanya melihat bahwa pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata, melainkan sejalan dengan konsep Islam sebagai suatu pranata sosial itu sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat eksistensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah SWT. Perbedaannya adalah pada kadar ketakwaannya sebagai bentuk perbedaan kualitatif.²¹

Nilai-nilai yang tercakup dalam pendidikan multikultural dapat mengantarkan individu bersikap toleran, menghargai nilai-

¹⁸Azyumardi Azra, Idris Thaha, *Dari Harvard...*, 151-152

¹⁹Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 1.

²⁰Roichan Achwan, "Prinsip-prinsip Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991, 23.

²¹M. Rusli Karim, "Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia", dalam *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Ed. Muslih Usa (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 32.

nilai kemanusiaan, dan suka pada perdamaian. Nilai-nilai itu sangat dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat madani sebab masyarakat madani memiliki ciri antara lain; universalitas, supremasi hukum, menghargai perbedaan, kebaikan dari dan untuk semua, meraih kebajikan umum, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.²²

MENANAMKAN KONSEP MULTIKULTURAL MELALUI PERIBAHASA

Tilaar menyatakan bahwa interelasi antara pendidikan dan kebudayaan dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik, karena:

1. Pendidikan telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata-mata. Karena kehidupan manusia mencakup bermacam-macam manifestasi kebudayaan yang dikenal manusia.
2. Kebutuhan akan identitas diri. Karena globalisasi dapat merupakan bahaya penggerhanaan identitas manusia termasuk hilangnya kebudayaan nasional dan lokal.²³

Pendidikan juga berperan aktif dalam mentransformasikan nilai-nilai partikular yang khusus yang hidup dalam masyarakat yang konkret. Bahkan tanpa pengenalan nilai-nilai yang khusus tersebut tidak mungkin seseorang menggapai nilai-nilai yang lebih abstrak atau nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

Nilai-nilai khusus tersebut yang berada dalam masyarakat adalah nilai-nilai, nasihat, pengalaman hidup masyarakat terdahulu, yang tersimpan dan terekam salah satunya dalam peribahasa. Karena Peribahasa merupakan bagian dari folklore. Dengan

²²Hujair A.H. Sanaky, "Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani", dalam Jurnal *Mukaddimah* No. 8 V/1999 (Yogyakarta: 1999), 21.

²³Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.2, 189-190.

²⁴Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, 190.

peribahasa kita dapat mengajarkan kepada generasi muda, nilai-nilai yang merupakan hasil dari pengalaman hidup orang tua kita dimasa lampau.

Folklore berasal dari *folk*²⁵ dan *lore*²⁶. Menurut Allan Dundes, folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun temurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).²⁷

Meskipun istilah *culture* yang dicetuskan E.B. Tylor pada tahun 1865 dan istilah *folklore* yang dicetuskan William John Thoms pada 22 Agustus 1846 sama-sama menekankan pada kebudayaan, namun terdapat perbedaan, istilah *folklore* hanya digunakan dalam arti kebudayaan yang lebih khusus, yaitu bagian kebudayaan yang diwariskan melalui lisan saja.²⁸

Ahli folklor Indonesia, James Danandjaja, Fungsi peribahasa antara lain: sebagai sistem proyeksi, sebagai alat pendidikan anak, dan sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Dan seperti bahasa lisan pada umumnya, peribahasa berfungsi pula sebagai alat komunikasi, terutama dalam hal pengendalian masyarakat (*social control*), yang secara konkret untuk mengkritik seorang yang telah melanggar norma masyarakat. Mencela seseorang dengan menggunakan peribahasa lebih mudah

²⁵ *Folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal itu antara lain dapat berwujud: warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang sama dan agama yang sama.

²⁶ *Lore* adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).

²⁷ James Danandjaja, *Folklor Indonesia; Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*, (Jakarta: Grafiti, 2002), cet.4, 2.

²⁸ James Danandjaja, *Folklor Indonesia*, 6.

diterima dan lebih kena sasarannya dibandingkan dengan celaan langsung. Hal ini disebabkan peribahasa adalah tidak bersifat perseorangan (*impersonal*), sehingga walaupun diucapkan orang tertentu, namun tidak dapat diidentifikasi dengan orang tertentu.²⁹

Peribahasa merupakan gambaran dari nilai-nilai kebudayaan, yang bisa kita temui kemiripan makna, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor kebudayaan. Hal ini merupakan bukti dari teori relativitas bahasa, bahwa makna sebuah kata terikat oleh lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa tertentu.³⁰

Berikut ini, penulis akan menyampaikan beberapa Peribahasa Arab yang memiliki kesamaan makna dengan peribahasa Indonesia, dengan tujuan dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebudayaan:

a. قبل الرماء تملأ الكنائن

(sebelum memanah, isi dulu tempat anak panah).

Hal ini sama dengan ungkapan bahasa Indonesia yang berbunyi: "*Sedia payung sebelum hujan*". Meskipun terdapat perbedaan lafadz dan kata-kata dalam kedua peribahasa tersebut, namun, keduanya mengandung persamaan maksud, yaitu: "siapkan segala sesuatu sebelum beraktivitas". Orang Arab menggunakan kata tempat anak panah dan memanah, karena dipengaruhi oleh budaya mereka yang memiliki tradisi berperang pada zaman dahulu dengan menggunakan alat tersebut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukan dan payung. Karena di Indonesia sering hujan.

²⁹ James Danandjaja, *Folklor Indonesia*, 32.

³⁰ Moh. Matsna, *Orientasi Semantik Al-Zamakhshyari*, (Jakarta: Anglo Media, 2006), 22.

b. إذا دخلت قرية فاحلف بالآلهها

(jika kamu memasuki suatu kampung, maka bersumpahlah atas nama Tuhannya)

Maksud dari peribahasa Arab tersebut adalah Sebagian manusia lebih mengutamakan mencari muka pada orang lain dan menyetujui apa yang mereka perbuat meskipun mereka tidak yakin akan kebenarannya, karena mereka mengetahui bahwa menentang adat tersebut akan membinasakan dan menyusahkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, seseorang hendaknya menyetujui dan mengikuti (adat yang berlaku) selama ia belum mampu mengubah hal-hal yang tidak ia setujui.

Peribahasa Arab tersebut memiliki persamaan dengan peribahasa Indonesia yang memiliki kandungan makna yang sama, meskipun diucapkan dengan lafaz yang berbeda yaitu: *Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*. Dan *Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah*, yaitu segala sesuatu harus kita kerjakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

c. لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة

(Tiap pedang yang tajam bisa meleset, tiap kuda bisa tergelincir dan tiap yang berilmu bisa salah)

Peribahasa ini mengandung makna bahwa sepintar-pintarnya seseorang ia pasti pernah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Dalam bahasa Indonesia terdapat salah satu peribahasa yang memiliki persamaan makna dengan masal ini yaitu “*sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga*”. Dengan demikian peribahasa tersebut dilontarkan pada seseorang yang mengalami keadaan seperti ini.

d. ترى الفتیان كالنخل وما يدريك ما الدخل

(Engkau melihat para pemuda seperti pohon kurma, dan apakah yang engkau ketahui di dalamnya?)

Peribahasa ini diucapkan ketika kita tertipu oleh penglihatan dan pandangan yang menipu, karena di sekitar kita akan kita temukan pemandangan yang mengelabui dan hanya sebagai fatamorgana. Dan peribahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama adalah: "*Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa yang tahu*"

e. إنه لأشبه به من التمرة بالتمرّة

(*Sesungguhnya ia benar-benar lebih menyerupainya dari pada buah kurma serupa dengan buah kurma*)

Peribahasa ini menyerupakan dua hal atau benda yang sangat serupa atau mirip. Adapun dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebuah peribahasa yang memiliki persamaan makna dengan masal tersebut yaitu "*bagaikan pinang di belah dua*".

Demikianlah, peribahasa merupakan bagian dari pendidikan untuk mentransfer nilai-nilai kearifan masyarakat, sehingga generasi muda dapat melihat bahwa meski dengan perbedaan budaya yang ada, masih terdapat nilai-nilai kearifan yang sama, sehingga dapat dijadikan salah satu pijakan untuk menjunjung persamaa dan menghilangkan perbedaan. Penjelasan diatas mengungkapkan bahwa peribahasa mengandung kearifan lokal atau kearifan yang muncul dari pengalaman masyarakat terdahulu.

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Secara etimologi pengertian kearifan lokal (*local wisdom*) diambil dari kata *Wisdom* yang dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penelitian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi.³¹

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang

³¹Nurma Ali Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Ibda'*, 5, No.1 (Jan-Jun 2007), 2.

sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya.³²

Berdasarkan pengertian secara etimologis tersebut, maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Dan masih terdapat beberapa pengertian kearifan lokal, diantaranya:

Kearifan lokal adalah seperangkat nilai dan pengetahuan yang dipelihara “secara eksklusif” oleh kelompok masyarakat lokal tertentu, yang pada mulanya berhubungan dengan cara-cara pemahaman dan praktik sosial masyarakat berhadapan dengan alam dan lingkungan (ekologi). Bentuk-bentuk pemeliharaan biasanya berupa ungkapan, peribahasa, dongeng-dongeng atau cerita mitos dan folor, filsafat sosial, atau bahkan dalam ritus-ritus budaya yang bertujuan memelihara keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan alam dan lingkungan (ekologi), dan secara khususnya menjaga hubungan baik dengan kekuatan supranatural (Tuhan).³³

Kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat.³⁴

Haryati Soebadio merngatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang

³²Ridwan, *Ibda'*, 2.

³³Aprinus Salam, *Perubahan Sosial dan Pertanyaan tentang Kearifan Lokal, Ibda'*, 5, No 2, (Jul-Des 2007), 7.

³⁴ <http://www.psbupn.org/article/kebudayaan-dan-kearifan-lokal-dalam-mengelola-lingkungan-dan-sumberdaya-air-kawasan-kars-gn-sewu.html>

menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri³⁵. Sementara Moendardjito seperti dikutip oleh Ayatrohaedi, mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

1. mampu bertahan terhadap budaya luar,
2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
3. memunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
4. memunyai kemampuan mengendalikan,
5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.³⁶

Setelah membandingkan kearifan lokal yang tergambar dalam peribahasa Indonesia dan peribahasa Arab. Berikut ini penulis berikan contoh beberapa kearifan lokal yang ada di Nusantara Indonesia. Elly Burhainy Faizal, seperti dikutip Sartini, mencontohkan beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Kearifan lokal terdapat di beberapa daerah:

1. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.
2. Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini

³⁵Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 18-19.

³⁶Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), 40-41.

yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.

3. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
4. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
5. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati, tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
6. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*.³⁷

Kerifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.

Balipos terbitan 4 September 2003 memuat tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu:

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.

³⁷<http://www.wacananusantara.org/6/279/menggali-kearifan-lokal-nusantara:-sebuah-kajian-filsafat>, 16 juni 2009, 13:21 WIB

2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*.
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
6. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.
7. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.
8. Bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*

KESIMPULAN

Keberagaman dalam pendidikan itu ada karena pendidikan tidak lepas dari konteks masyarakat. Anak-anak sebagai pusat perhatian pendidikan yang sering terlupakan kepentingannya adalah bagian dari konteks sosialnya. Mereka memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, menjadi alasan bahwa mereka penting mendapat pendidikan multikultural agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab sekolah melalui pendidikan dan mata pelajaran di sekolah, maka pendidikan multikultural dapat ditanamkan pada anak, termasuk melalui pendidikan agama sejak dini. Maka dengan begitu, narasi agama, budaya dan kearifan lokal akan menjadi arus utama dan akan menggantikan narasi-narasi kekerasan yang intoleran dalam dunia pendidikan.

Pendidikan Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dengan membawa potensi bawaan seperti keimanan, potensi memikul amanah dan tanggungjawab, potensi kecerdasan dan potensi fisik yang sempurna. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dan dengan bantuan orang lain atau mendidik dengan secara sengaja agar menjadi manusia muslim yang mampu berinteraksi dengan baik bagi sesama makhluk dan mampu menjadi khalifah dan mengabdikan pada Allah SWT.

Agar seseorang mampu berkembang dan berinteraksi dengan sesamanya di lingkungannya, maka perlu dibekali kemampuan untuk dapat eksis dan diterima sehingga sejak dini seorang individu muslim mampu melihat perbedaan dan keragaman yang ada di sekitarnya. Mereka tidak hanya mengenal dan mengakui tata cara yang berdasarkan ajaran Islam semata, tetapi mereka diharapkan mampu memahami bahwa ada tata cara yang lain yang mungkin berbeda. Perbedaan-perbedaan itu hendaknya jangan ditanggapi secara apriori, tetapi dapat ditangkap sebagai suatu yang wajar dan perlu dihargai. Untuk dapat memiliki sikap hidup yang demikian diperlukan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menangani keragaman yang ada, baik itu budaya, agama, etnis, dan sebagainya dengan cara menumbuhkan semangat penghargaan terhadap hal yang berbeda. Perbedaan adalah rahmat, bukan suatu yang tercela atau suatu dosa sebab manusia dan alam diciptakan dalam keragaman.

Dengan demikian, perlu memandang pendidikan multikultural sebagai sebuah dimensi praktis multikulturalisme, di mana tidak hanya memahami konsep, tetapi harus mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan lainnya di sekolah dan di masyarakat.

Agar pendidikan multikultural terlaksana, beberapa usaha perlu dibuat, seperti: kurikulum dan bahan pelajaran yang lebih diversity dan non-diskriminatif; pendekatan yang bermacam-macam sehingga budaya lain mendapatkan perhatian dan tempat; evaluasi sekolah lebih menekankan proses; ekstrakurikuler yang menyemangati siswa untuk berpartisipasi terlebih yang kecil; sering mengundang pembicara yang berbeda-beda suku, budaya; bahkan dekorasi sekolah pun perlu beraneka ragam dari berbagai budaya. Inilah narasi-narasi moderat yang toleran yang harus terus dikembangkan untuk mengantisipasi masuknya paham-paham radikalisme dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Roichan. 1991. "Prinsip-prinsip Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Azra, Azyumardi, dan Idris Thaha. 2005. *Dari Harvard hingga Makkah*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Bank, James A. 1998. *Multikultural Education: Issues and Perspectives*. London: Allyn and Bacon Press.
- Cardinas, Jose A. 1975. *Multikultural Education: A Generation of Advocacy*, America: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Danandjaja, James Danandjaja. 2002. *Folklor Indonesia; Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*, Jakarta: Grafiti.
- Gollnick, Donna M. 1983. *Multikultural Education in a Pluralistik Society*, London: The CV Mosby Company.
- Gracia. Ricardo L. 1982. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.

- Husain, Sajjad Husain dan Ali Ashraf. 1994. *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam, Terj. Rahmani Astuti*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Karim, M. Rusli. 1991. "Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia", dalam *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Ed. Muslih Usa Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Liliweri, Alo Liliweri. 2005. *Prasangka & konflik: komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Matsna, Moh. Matsna. 2006. *Orientasi Semantik Al-Zamakhsyari*, Jakarta: Anglo Media.
- Ridwan, Nurma Ali. 2007. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Ibda'*, 5, No.1 Jan-Jun .
- Salam, Aprinus. 2007. Perubahan Sosial dan Pertanyaan tentang Kearifan Lokal, *Ibda'*, 5, No 2, Jul-Des.
- Sanaky. Hujair A.H. 1999. "Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani", dalam *Jurnal Mukaddimah* No. 8 V/1999. Yogyakarta.
- Sartini dalam "Mengali Kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian Filsafat". <http://www.wacananusantara.org/6/279/menggali-kearifan-lokal-nusantara:-sebuah-kajian-filsafat>, 16 juni 2009, 13:21 WIB
- Suryadinata, Leo Suryadinata. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Tilaar. H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- _____, 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta